



**DINAS SOSIAL  
KOTA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
2020 PEMERINTAH**

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Sosial Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKIP Dinas Sosial Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL



H. Sisruwadi, SH., M.Kn.  
Nip. 19620204 198903 1 020

## Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Kinerja Dinas Sosial yang dihasilkan di tahun 2020, adalah :

Sasaran : Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat,dengan indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 83,33.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya sinergi setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan masalah
2. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kebijakan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Fungsi dan Tugas .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	3
1.4 Keadaan Pegawai.....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	6
1.6 Keuangan.....	8
1.7 Sistematika LKj IP.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perencanaan Strategis.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019	
2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial.....	14
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Lainnya.....	16
3.4. Realisasi Anggaran.....	20
3.5. Inovasi.....	23
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>LAKIP Dinas Sosial 2020</b>	

## Daftar Tabel

Tabel.1.1. Personil Dinas Sosial.....	4
Tabel.1.2. ASN Dinas Sosial Kota Yogyakarta Menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	5
Tabel.1.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosia Tahun 2019.....	6
Tabel.2.1. Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Kota Kota Yogyakarta 2017 – 2022.....	11
Tabel.2.2. Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	12
Tabel.2.3. Strategis, Program dan Kegiatan.....	13
Tabel.2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2009.....	13
Tabel.2.5. Target Belanja Dinas Sosial APBD Perubahan Tahun 2019.....	14
Tabel.2.6. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis.....	14
Tabel.3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	15
Tabel.3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	16
Tabel.3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	16
Tabel.3.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	17
Tabel.3.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2019.....	20
Tabel.3.6. Analisis Efisiensi.....	20

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan periode selanjutnya. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2020 diharapkan dapat:

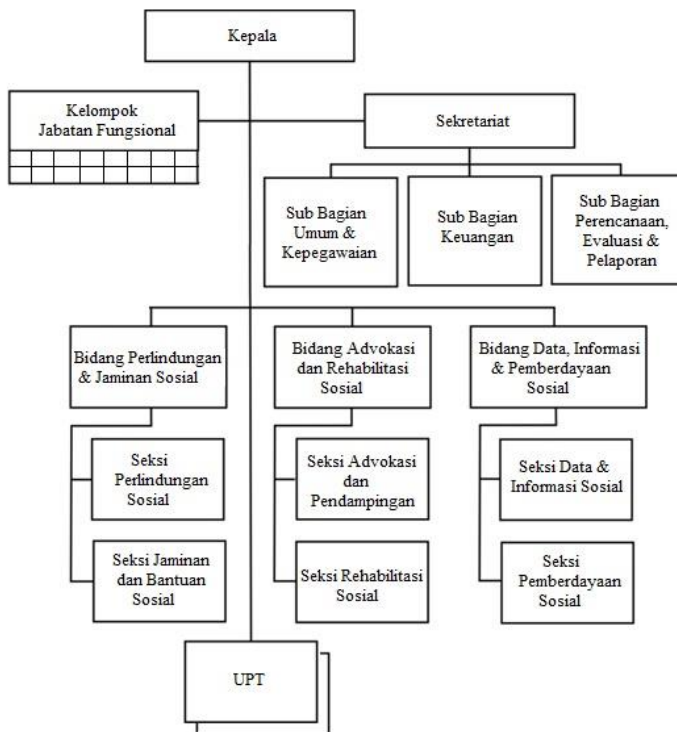
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial

2. Mendorong Dinas Sosial didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



## 1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang sosial;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan usulan pemerintahan di bidang sosial.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda Indonesia secara luas. Tak terkecuali Kota Yogyakarta. Pandemi ini berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pandemi berdampak cukup serius terutama bagi masyarakat miskin dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Perekonomian masyarakat menurun, bahkan anjlok. Aktivitas ekonomi dalam skala besar maupun kecil berusaha bertahan dengan pemasukan harian yang tidak menentu. Dampak sosialnya, masyarakat kesulitan untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Selain masalah ekonomi, warga masyarakat yang terpapar Covid-19, baik sebagai pasien positif/terkonfirmasi maupun penyintas (Orang Tanpa Gejala/ Orang dalam Pengawasan) mengalami disfungsi sosial. Mereka harus dikarantina selama 14 hari baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Permasalahan timbul ketika masyarakat mulai mendiskriminasi para korban covid-19 mulai dari menjauhi, tidak memperdulikan, mengacuhkan bahkan sampai diusir. Banyak kasus penolakan terjadi dari masyarakat bagi jenazah korban covid-19 yang hendak

dimakamkan di wilayah tertentu. Kurangnya pemahaman masyarakat membuat rasa peduli, dan toleransi hilang begitu saja.

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Yogyakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia baik sebagai ASN maupun Non ASN. Personil pendukung tersebut antara lain :

**Tabel 1.1. Personil Dinas Sosial Kota Yogyakarta**

No	Uraian	Jumlah Personil
1	Aparatur Sipil Negara	52
2	Tenaga Bantuan (Naban)	12
3	Pekerja Sosial Profesional	5
4	Penyuluh Sosial Profesional	4
5	Tenaga Teknis	27
6	TKSK	14
7	PSM	1.142
8	Pendamping KUBE	15
9	Pendamping PKH	45
10	SAKTI PEKSOS	5

**Tabel.1.2. ASN Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2020  
Menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
	Golongan	
1	IV	8
2	III	29
3	II	14
4	Naban	12
	Pendidikan	
1	S2	2
2	S1	27
3	Diploma I - III	7
4	SLTA	23
5	SLTP	1
6	SD	1
	Jenis Kelamin	
1	Perempuan	30
2	Laki - laki	21

## 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel.1.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial 2020

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/ Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Sat	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
No Urut	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis/ Barang	Merk/Type	No.Sertifikat/No.Pabrik/No.Rangka/No.Mesin	Jumlah Barang							Harga (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	02.06.03.02.02	00001	Lap Top	ESC/ESC	- / - / -	-	Pembelian	2003	-	bh	RB	1	7130000	
2	02.06.03.02.02	00001	Laptop	ECS, A907/Laptop	- / - / -	Besi + plastik	Pembelian	2003	-	bh	-	1	7910000	
3	02.06.03.02.02	00001	Laptop	ACER ASPIRE/-	- / - / -	-	Pembelian	2018	-	bh	B	1	6400000	
4	02.06.03.02.03	00001	Note Book	Toshiba/Toshiba	- / - / -	-	Pembelian	2007	-	bh	RB	1	7910000	
5	02.06.03.02.03	00002	Notebook	Lenovo/G450	- / - / -	-	Pembelian	2009	-	bh	KB	1	7422000	
6	02.06.03.02.03	00003	Notebook	Dell /Inspiron 140	- / - / -	Mika	Pembelian	2010	-	bh	KB	1	7163467,46	
7	02.06.03.02.03	00004	Notebook	Lenovo/IdeaPad Z370	- / - / -	Plastik	Pembelian	2011	14 inch	bh	-	1	6269315,55	
8	02.06.03.02.03	00001	NOTEBOOK	SAMSUNG/NP270E4V-K040	- / - / -	-	Pembelian	2014	-	bh	KB	1	6949397,17	
9	02.06.03.02.03	00001	Notebook	DELL /INSPIRON 14R 5437	- / - / -	Plastik	Pembelian	2015	-	bh	KB	1	8583525,68	
10	02.06.03.02.03	00008	Notebook	Dell /Inspiron 5437 (TOUCH DISPLAY)	- / - / -	Plastik besi	Pembelian	2015	-	bh	KB	1	9099727,34	
11	02.06.03.02.03	00009	Notebook	Dell /Inspiron 5437 (TOUCH DISPLAY)	- / - / -	Plastik besi	Pembelian	2015	-	bh	KB	1	9099727,34	
12	02.06.03.02.03	00010	Notebook	Dell /Inspiron 5437 (TOUCH DISPLAY)	- / - / -	Plastik besi	Pembelian	2015	-	bh	KB	1	9099727,34	
13	02.06.03.02.03	00001	NOTEBOOK	DELL /Inspiron 5458 (Core i5-5200U Win 8)	- / - / -	plastik	Pembelian	2016	-	bh	KB	1	8733491,66	
14	02.06.03.02.03	00001	NOTEBOOK	HP /240 G5	- / - / -	plastik	Pembelian	2016	-	bh	KB	1	9313665,03	
15	02.06.03.02.03	00001	NOTE BOOK	ACER/-	- / - / -	-	Pembelian	2018	-	bh	B	1	3950000	
16	02.06.03.02.03	00001	Notebook	AXI00/-	- / - / -	elektronik	Hadiah	2018	-	bh	B	1	3000000	
17	02.06.03.02.03	00002	Notebook	DELL/-	- / - / -	elektronik	Hadiah	2018	-	bh	B	1	4837333	
18	02.06.03.02.05	00001	Komputer Tablet	Samsung/Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	- / - / -	Plastik	Pembelian	2012	-	bh	B	1	3806035,88	
19	02.06.03.02.03	00001	NOTE BOOK	ASUS X441MA-GA02IT			BM	2019		bh	B	1	5000000	
20	02.06.03.02.03	00002	NOTE BOOK	ASUS X441MA-GA02IT			BM	2019		bh	B	1	5000000	
21	02.06.03.02.02	00003	LAKTOP	LENOVO			pinjam pakai dari KemenSos RI	2013		bh	KB	1		
22	02.06.03.02.03	00004	Note Book	HP UN.3481			hadiah dari Bagor	2019		bh	B	1	6549120	

## **1.6 Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada APBD Murni tahun anggaran 2020, Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 16.471.474.295 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 4.014.807.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 12.456.667.295. Pada APBD Perubahan 2020, anggaran tersebut berubah menjadi Rp 11.063.947.607 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.580.279.000 dan belanja langsung sebesar Rp 7.483.668.607 yang dimanfaatkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan.

## **1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

LAKIP Dinas Sosial 2020

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**

## BAB 2

### Perencanaan Kinerja

#### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2019*

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2017 – 2022. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022.

Dalam perjalanan waktu, dilakukan review atas Renstra Dinas Sosial. Hal ini dilakukan untuk merespon perkembangan yang terjadi. Tahun 2020, pandemi Covid 19 melanda Indonesia secara umum dan berdampak secara luas di berbagai lini kehidupan. Program kerja Pemerintah pun mengalami perubahan. Perhatian dan sumber daya dikerahkan untuk menangani pandemi berikut dampaknya. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memperkuat program dan kegiatan yang bersifat jaminan dan bantuan sosial serta perlindungan sosial. Perlindungan sosial ditujukan bagi masyarakat penyintas Covid 19, sedangkan jaminan dan bantuan sosial ditujukan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat miskin/marginal.

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Walikota Yogyakarta dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022**



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun dengan indikator capaian sasaran Angka Kemiskinan menurun. Selain itu, Dinas Sosial juga berkontribusi dalam pencapaian sasaran Daerah pendukung yaitu Keberdayaan Masyarakat Meningkat, Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, Kualitas Pendidikan Meningkat, Harapan Hidup Masyarakat Meningkat, Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Sosial selama 5 tahun anggaran adalah :

Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial

#### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat  Review	-	77	79,04	82,30	83,20	-	-
				77	79,04	82,30	82,90	-	-

### 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Perlindungan Sosial 2. Jaminan dan Bantuan Sosial
		Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial 2. Advokasi dan Pendampingan PMKS
		Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	1. Pendataan PMKS dan PSKS 2. Pemberdayaan Sosial

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET REVIEW RENSTRA
1	2	3	4	5	
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat	-	85,20	82,90

Tahun 2020, Dinas Sosial melakukan perubahan target sasaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Target sasaran diturunkan mengingat beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena sumber dayanya dialihkan untuk penanganan pandemi. Selain itu, untuk mengurangi resiko paparan virus yang sedang melanda.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 16.471.474.295 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 4.014.807.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 12.456.667.295. Pada APBD Perubahan 2020, anggaran tersebut berubah menjadi Rp 11.063.947.607 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.580.279.000 dan belanja langsung sebesar Rp 7.483.668.607 yang dimanfaatkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

#### 2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial

**Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Sosial APBD Perubahan Tahun 2020**

Uraian	Target	Prosentase
<b>APBD Murni</b>	Rp 16.471.474.295,-	100 %
Belanja Tidak Langsung	Rp 4.014.807.000,-	100 %
Belanja Langsung	Rp 12.456.667.295,-	100 %
<b>APBD Perubahan</b>	Rp 11.063.947.607,-	100 %
Belanja Tidak Langsung	Rp 3.580.279.000,-	100 %
Belanja Langsung	Rp 7.483.668.607,-	100 %

### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Dikarenakan sasaran Dinas Sosial hanya satu, maka seluruh anggaran belanja langsung dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut.

**Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No 1	Sasaran 2	Anggaran 3	Prosentase 4	Keterangan 5
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	APBD Murni : Rp 12.456.667.295 APBD Perubahan Rp 7.483.668.607	100 %	Program teknis dan program pendukung

## BAB 3

### Akuntabilitas Kinerja

#### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi*

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020**

Dinas Sosial telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Capaian kinerja diukur dengan metode membandingkan antara rencana dan realisasi.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara umum, pengukuran capaian kinerja program/kegiatan bersifat semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya, semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Hasil pengukuran selanjutnya dimasukkan kedalam kategorisasi kinerja, yaitu :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥ 100	Sangat Baik
2.	76 ≥ 90	Tinggi
3.	66 ≥ 75	Sedang
4.	51 ≥ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan pada level sasaran dan program dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERINGKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat	-	82,90	83,33	100,52 %	Sangat Baik

Dari tabel di atas, terlihat jelas hasil kinerja Dinas Sosial. Pada tahun 2020, Dinas Sosial telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 83,33. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial sebesar 100,52 %.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Lainnya

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci diuraikan sebagai berikut:

LAKIP Dinas Sosial 2020

### 3.2.1 Sasaran Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30%Persentase PSKS yang aktif

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan. Target kinerja diturunkan mengingat pandemi yang melanda berdampak pada penyesuaian rencana kerja dan anggaran.

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 thd target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi *		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat	88,64	82,90	83,33	100,52	87,85	94,85
Indikator Sasaran tersusun atas capaian indikator program							
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	87,97	84	84,13	100,15	85	99,98
3	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosialisasi						
	Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	89,58	77	78,10	101,43	87	89,77
4	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial						
	Rerata persentase PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	88,61	87,34	87,50	100,18	90	97,22

Capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 sebesar 83,33 melebihi target yang ditetapkan yakni 82,90. Namun capaian tersebut lebih rendah dibanding capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2019. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pengalihan perhatian dan sumber daya untuk menghadapi pandemi Covid-19. Namun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra, capaian sasaran tersebut telah mendekati, mencapai 94,85 persen. Dengan capaian tersebut, target akhir periode Renstra optimis dapat diraih.

Capaian kinerja program yang baik tersebut, didukung oleh kegiatan :

1. Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial
2. Kegiatan Perlindungan Sosial



3. Kegiatan Pelayanan di RPLU Budhi Dharma
4. Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo
5. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS
6. Kegiatan Rehabilitasi PMKS
7. Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS
8. Kegiatan Pemberdayaan PSKS

Meskipun dilanda pandemi kinerja yang dibukukan oleh Dinas Sosial cukup baik. Tingginya capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), antara lain TKSK (Tenaga Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) dan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). TKSK dan PSM berperan aktif dalam proses penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dana APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY maupun APBN. WKSBM dan LKS berperan dalam menangani permasalahan di lingkungannya masing-masing.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder kunci yang intensif. Contohnya dalam penyaluran bantuan sosial. Di lapangan, banyak ditemukan kasus dobel data atau data penerima yang tidak valid. Untuk mengatasi hal ini diperlukan konfirmasi dengan pengampu data, baik data kependudukan, data KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk memudahkan proses tersebut Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian membuat aplikasi komputer khusus untuk keperluan tersebut.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pendataan KSJPS yang rutin dilakukan oleh Dinas Sosial setiap tahunnya, pada tahun 2020 dilaksanakan dengan bantuan aplikasi android. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid 19 dengan mengurangi kontak pendata dengan responden.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial berhasil mewujudkan kinerja yang baik. Program/kegiatan yang dijalankan menunjang LAKIP Dinas Sosial 2020

keberhasilan capaian tersebut. Meski berhasil, pelaksanaan program/kegiatan juga menemui beberapa hambatan antara lain :

1. Pada Kegiatan Pemberdayaan PSKS, proses regenerasi Karang Taruna yang tidak lancar mengakibatkan lembaga tersebut tidak dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan pendekatan melalui Lurah dan tokoh masyarakat lainnya. Diharapkan mereka dapat memotivasi anggota Karang Taruna untuk lebih berani mengekspresikan diri menjadi motor penggerak lembaga.
2. Upaya-upaya baik yang menjadi pendorong program/kegiatan masih bersifat sporadis, belum menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu disosialisasikan kepada pihak internal pengampu kegiatan agar dapat mengadopsi upaya-upaya baik tersebut.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 95,78% dari total anggaran yang dialokasikan atau sebesar Rp 10.596.828.300,97 dari rencana anggaran sebesar Rp 11.063.947.607. Dari realisasi tersebut, proporsi realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar 32,05 % atau sebesar Rp 3.396.309.931 dari rencana anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3.580.279.000. Sedangkan proporsi realisasi anggaran belanja langsung sebesar 67,05% atau sebesar Rp 7.200.518.369,97 dari rencana anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.483.668.607.

Dari seluruh realisasi belanja langsung Dinas Sosial, sebesar 55,68% digunakan untuk program/kegiatan utama. Sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar 44,32%. Karena sasaran Dinas Sosial hanya satu indikator, maka seluruh realisasi anggaran tersebut mendukung capaian sasaran.

Jika dilihat dari komponen indikator, penyerapan anggaran terbesar pada program Jaminan dan Perlindungan Sosial dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 3.469.580.889,70 (48,18 % dari keseluruhan realisasi belanja langsung). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Advokasi

dan Rehabilitasi Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 751.758.400,20 (10,44% dari keseluruhan realisasi belanja langsung).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Kesejahteraan Sosial	82,90	83,33	100,51	11.063.947.607	10.596.828.300,97	95,78
<b>Jumlah</b>						11.063.947.607	10.596.828.300,97	95,78
<b>Total BelanjaLangsung</b>						11.063.947.607	10.596.828.300,97	95,78

**Tabel 3.6 Analisis efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Kesejahteraan Sosial	100,51	95,78	4,22

#### Analisis Efisiensi

Dari sasaran strategis yang ditetapkan, capaiannya melebihi target yakni sebesar 100,51 %, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,22% (Rp 467.119.306). Efisiensi anggaran diperoleh dengan melakukan perbaikan administrasi penatausahaan kegiatan dan keuangan, digitalisasi tata laksana dan tata usaha kegiatan.

1. Perbaikan administrasi penatausahaan keuangan dilakukan dengan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pimpinan meminta kepada Inspektorat untuk mengaudit laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan. Langkah ini sebagai upaya menjaga pelaksanaan kegiatan berikut pelaporannya mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sekaligus dapat mendeteksi pengeluaran yang tidak perlu.
2. Digitalisasi tata laksana dan tata usaha kegiatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang telah dibangun dan berlaku di seluruh unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Misalnya E-Office, SIPKD dan lain-lain. Digitalisasi ini membuat jalannya kegiatan lebih mudah dan cepat serta tidak membutuhkan kertas yang lebih banyak dibandingkan pelaksanaan secara manual.

## BAB 4

### Penutup

**Bab 5 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari laporan kinerja Dinas Sosial Tahun 2020, dapat disimpulkan indikator sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai. Bahkan capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode perencanaan jangka menengah. Dengan capaian tersebut maka diperlukan langkah tindak lanjut berupa penentuan target baru yang mencerminkan kinerja yang lebih tinggi. Penentuan target tersebut dilakukan melalui mekanisme review Renstra.

**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

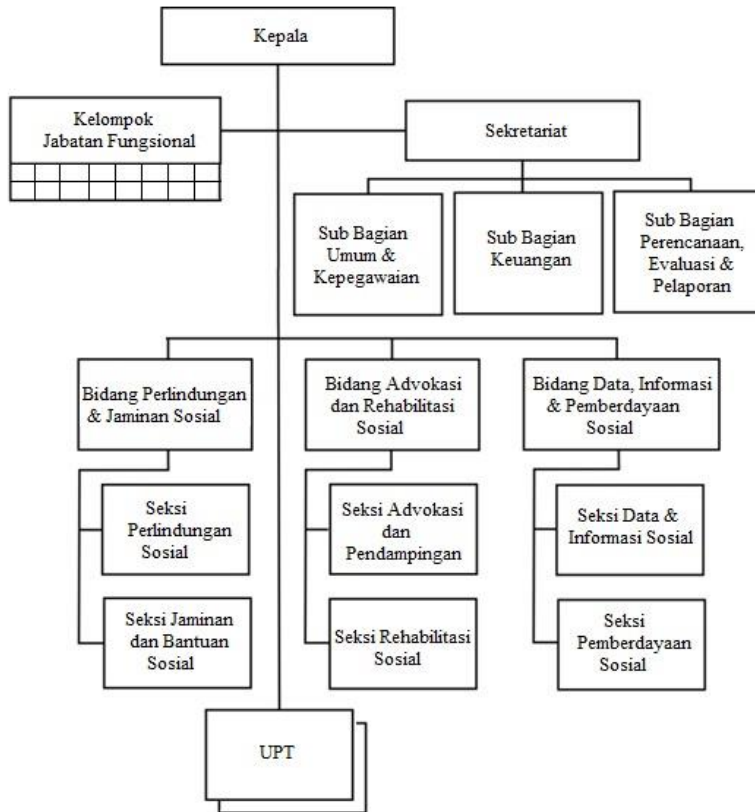
**Commented [A1]:** Ditambah:  
**Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2020**  
**Lampiran 5 Rencana Aksi**

(sesuai dengan tambahan yang ada di BA)

**Commented [A2]:** Diubah menjadi **Lampiran 6.**  
Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

**Commented [A3]:** Diubah menjadi **Lampiran 7.** Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi



## Lampiran 2. Perencanaan Strategis

Sasaran	Indikator Sasaran	Metodologi	Formula Indikator	Target Sasaran					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	<p>PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BNPT</li> <li>- PKH</li> <li>- Anak terlantar</li> <li>- Lansia terlantar</li> <li>- Santunan kematian</li> <li>- Orang terlantar</li> </ul> <p>PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUBE</li> <li>- Penyandang disabilitas</li> <li>- Penyandang sakit jiwa</li> <li>- Korban Tindak Kekerasan/Perempuan Rawan Sosial Ekonomi</li> <li>- Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis</li> </ul> <p>PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karangtaruna</li> <li>- WKSBM</li> <li>- LKS</li> <li>- TSKS</li> <li>- PSM</li> </ul>	<p>40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30%Persentase PSKS yang aktif</p> <p><b>Sumber Data</b></p>	77,00	79,04	82,30	85,20	86,20	87,10
			<p>Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga</p>	80%	80%	82%	84%	85%	85%
			<p>Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga</p>	70%	70%	77%	83%	85%	87%
			<p>Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring</p>	80%	86,80 %	88%	89%	89%	90%



LAKIP Dinas Sosial 2020

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2019



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tlp. (0274) 515865, 562682, EMAIL :  
sosial@lojakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail : upik@lojakota.go.id  
website : www.lojakota.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BEJO SUWARNO, SH  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI  
Jabatan : Walikota Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

  
Pihak Kedua  
  
H. HARYADI SUYUTI

  
Pihak Pertama  
  
BEJO SUWARNO, SH  
NIP. 195903071985031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS SOSIAL  
KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	82,30

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 5.244.676.174	APBD
2. Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Rp 1.778.112.638	APBD
3. Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Rp. 2.374.391.779	APBD

Walikota Yogyakarta



H. HARYADI SUYUTI

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Sosial


BEJO SUWARNO,SH  
NIP. 195903071985031007



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS SOSIAL**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682,  
Fax (0274) 563730  
Email : [sosial@jogjakota.go.id](mailto:sosial@jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sudrajat, SKM., M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta  
Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : H. Haryadi Suyuti  
Jabatan : Walikota Yogyakarta  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

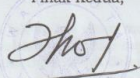
Pihak Kedua,  
  
H. HARYADI SUYUTI

Yogyakarta, 12 SEP 2019  
Pihak Pertama,  
  
AGUS SUDRAJAT, SKM., M.Kes  
NIP. 196505301988031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	82,3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 4.977.001.525	Perubahan APBD 2019
2. Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Rp 1.763.820.000	Perubahan APBD 2019
3. Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Rp 2.361.993.000	Perubahan APBD 2019

Pihak Kedua,  
  
**H. HARYADI SUYUTI**

Yogyakarta, 12 SEP 2019  
 Pihak Pertama,  
  
**AGUS SUDRAJAT, SKM., M.Kes**  
 NIP. 196305301988031006

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Ket	Program	Pagu	Triwulan IV		Ket
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	82.30 %	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30%Persentase PSKS yang aktif	88.65 %	100.00	-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.977.001.525,00	4.671.430.784,68	93,86	
								Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1.753.820.000,00	1.722.002.938,64	98,19	

									Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	2.361.993.000,00	2.307.100.905,12	97,68	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------	--

Faktor Pendorong: Jejaring kerja yang kooperatif

Uraian Permasalahan: Perubahan regulasi yang mendadak di tengah tahun anggaran berjalan

Rencana Tindak Lanjut: Dalam penyusunan Renja 2021 agar memperhatikan hal-hal yang sifatnya uncontrollable.

Yogyakarta,

Kepala

Agus Sudrajat, SKM, M.Kes

NIP. 196505301988031006

## Lampiran 5. Rencana Aksi

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT  
DAERAH : DINAS SOSIAL  
TAHUN : 2019

No	Sasaran	Indikator	Target 2019				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2019				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	17,62%	64,70%	78,75%	82,30%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17,42%	65,00%	80,00%	82,00%	4.977.001.525
							Perlindungan Sosial		23,74%	58,80%	87,70%	100,01%	741.565.000
							- Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se- Kota Yogyakarta	1.00 kali	0.00 %	10.00 %	100.00 %	100.00 %	117.891.000
							- Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1.00 dokumen	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %	239.422.497
							- Jasa piket Tagana	365.00 hari	24.66 %	49.59 %	74.79 %	100.00 %	87.600.000
							- Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan	8.00 kelompok	15.00 %	35.00 %	100.00 %	100.00 %	51.384.000

LAKIP Dinas Sosial 2020



								Pengetahuan								
								- Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	2.00 kali	0.00 %	50.00 %	50.00 %	100.00 %			10.720.000
								- Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1.00 kali	10.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %			98.385.000
								- Workshop Komisi Daerah Lansia	15.00 kali	45.00 %	80.00 %	87.00 %	100.00 %			197.132.494
								- Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	3.00 kali	45.00 %	99.00 %	100.00 %	100.00 %			22.535.000
								- Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %			1.080.000
								- Workshop Pelopor Perdamaian	1.00 kali	15.00 %	30.00 %	85.00 %	100.00 %			9.365.000
								Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial		24,99%	51,58%	74,97%	100,00%			1.353.188.000
								- Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlarang	4.00 kali	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %			501.862.497
								- Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non	12.00 kali	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %			304.148.750

LAKIP Dinas Sosial 2020

							Tunai (BPNT)										
							- Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4.00 kali	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %	204.093.744				
							- Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	1.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	41.006.474				
							- Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12.00 kali	24.99 %	51.00 %	74.97 %	100.00 %	371.874.610				
							- Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan	1.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	32.500.000				
							- Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota	1.00 Dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	23.682.497				

LAKIP Dinas Sosial 2020

								Yogyakarta														
								Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo			24,99%	55,00%	76,57%	100,00%	1.142.744.000							
								Anak terlantar yang dilayani	12.00 bulan		24.99 %	55.00 %	76.57 %	100.00 %	1.167.183.160							
								Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma			24,99%	49,98%	74,97%	100,00%	1.739.504.525							
								Lanjut usia terlantar yang dilayani	12.00 bulan		24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	1.762.809.451							
								Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		17,76%	60,00%	75,83%	77,00%	1.753.820.000							
								Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			18,60%	55,90%	90,28%	99,99%	455.504.000							
								1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti	55.00 orang		9.00 %	50.00 %	95.00 %	100.00 %	109.739.500							

LAKIP Dinas Sosial 2020

									kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha							
									2. Keluarga penyangg sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ	95.00 orang	11.94 %	30.32 %	83.08 %	100.00 %	34.218.497	
									3. Klien Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25.00 orang	1.32 %	92.98 %	94.30 %	100.00 %	13.676.500	
									4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihandan medapatkan bantuan modal usaha	40.00 orang	0.00 %	3.47 %	100.00 %	100.00 %	28.802.000	
									5. Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan	20.00 orang	3.74 %	96.26 %	100.00 %	100.00 %	21.400.000	

LAKIP Dinas Sosial 2020

									keterampilan dan bantuan modal usaha								
									6. Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1.00 dokumen	15.00 %	50.00 %	80.00 %	100.00 %			161.225.000
									7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan	20.00 orang	1.51 %	86.37 %	100.00 %	100.00 %			14.856.000
									8. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20.00 orang	93.55 %	93.55 %	100.00 %	100.00 %			12.406.000
									9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60.00 orang	93.28 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %			6.695.000
									10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150.00 orang	81.68 %	81.68 %	100.00 %	100.00 %			15.280.000
									11. Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga	4.00 kegiatan	25.00 %	65.00 %	100.00 %	100.00 %			22.035.000

LAKIP Dinas Sosial 2020

								12. Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga	4.00 kegiatan	54.03 %	98.98 %	100.00 %	100.00 %	22.035.000
								Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		21,82%	46,37%	68,84%	99,99%	1.298.316.000
								Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	1.00 dokumen	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %	408.349.497
								Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	1.00 dokumen	0.00 %	29.00 %	70.00 %	100.00 %	2.400.000
								Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	1.00 dokumen	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %	109.584.994
								Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar	1.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	33.750.000
								Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	1.00 dokumen	24.99 %	52.00 %	74.97 %	100.00 %	583.013.050
								Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1.00 kali	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	90.966.600

LAKIP Dinas Sosial 2020

							Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	22.360.000
							Buku KUBE yang tersusun	1.00 dokumen	0.00 %	20.00 %	65.00 %	100.00 %	65.320.000
						Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif		17,76%	69,00%	80,00%	88,00%	2.361.993.000
						Pendataan PMKS dan PSKS			24,23%	54,76%	83,04%	100,01%	1.401.961.000
						Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1.00 dokumen	24.00 %	55.00 %	83.00 %	100.00 %	1.256.061.794	
						Data base PSKS	1.00 dokumen	27.00 %	59.00 %	94.50 %	100.00 %	15.928.000	
						Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1.00 dokumen	26.00 %	52.00 %	82.00 %	100.00 %	124.869.994	
						Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)			36,88%	53,06%	79,68%	100,01%	960.032.000

								1. Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2.00 kali	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	24.000.000
								2. Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1.00 kali	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	16.805.000
								3. Sunatan Massal HKSNI bagi anak tidak mampu	1.00 kali	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	67.137.500
								4. Jenis seleksi PSKS berprestasi	1.00 kali	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	78.395.000
								5. Optimalisasi PSKS	5.00 jenis	30.00 %	50.00 %	90.00 %	100.00 %	652.551.994
								6. Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2.00 kali	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	70.540.000
								7. Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yogyakarta	1.00 dokumen	13.21 %	33.07 %	52.75 %	100.00 %	36.062.497
								8. Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1.00 kali	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	32.040.000



Yogyakarta,  
Kepala

Agus Sudrajat, SKM,  
M.Kes  
NIP.  
196505301988031006

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tlp.(0274)  
515865, 562682, EMAIL : [sosial@jogjakota.go.id](mailto:sosial@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail :  
[upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
website : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA**  
**DINAS SOSIAL**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU dan Laporan Kinerja agar dipublikasikan pada website Dinas Sosial	Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU dan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui website
2	Target jangka menengah dalam renstra yang telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, agar dibuat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik	Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya, SOP Review Renstra disusun.
3	Rencana aksi atas kinerja agar menyelaraskan target perjanjian kinerja	Rencana aksi atas kinerja telah menyelaraskan target perjanjian kinerja dan memanfaatkan teknologi informasi (SIM e- Lakip)
4	Mekanisme pengumpulan data kinerja agar dibuat berikut tata kalanya	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja
5	Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

**Kepala Dinas,**

**Agus Sudrajat, SKM.,M.Kes**

## Lampiran 7 Penghargaan - Penghargaan

1. Juara Harapan III Lomba Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Juara I LKS Berprestasi Tingkat DIY
3. Juara Harapan III PSM Berprestasi Tingkat DIY
4. Juara Harapan III WKSBM Berprestasi Tingkat DIY
5. Juara Harapan III Karang Taruna Berprestasi Tingkat DIY
6. Juara I Tingkat Nasional Desain Poster Germas
7. Juara I KUBE Sejahtera Tingkat DIY
8. Juara I Pendamping KUBE Tingkat DIY





LAKIP Dinas Sosial 2020